

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Paket peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government*.

Paket peraturan perundang-undangan tersebut menggantikan ketentuan perundang-undangan warisan kolonial yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan pengelolaan keuangan Negara modern. Selain paket peraturan perundang-undangan keuangan tersebut diatas, juga telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan pengaturan keuangan sehubungan dengan adanya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: 1). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 2). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, 3). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 4). Peraturan Pemerinta Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 5). Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan lahirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi transparan untuk tahun 2007 dan seterusnya. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, sehingga menghasilkan laporan keuangan. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2007 SKPD di setiap Kabupaten mulai berupaya mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem

tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 1995). Faktor perilaku yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi faktor organisasional (pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan). Penelitian ini akan menguji Pengaruh Keperilakuan organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 Atas Perubahan Permendagri No.13 Tahun 2006, dimana sistem tersebut mulai diimplementasikan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini akan menguji pengaruh faktor perilaku organisasional, dalam meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Surakarta.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Surakarta”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah keperilakuan organisasi ditinjau dari dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
2. Apakah keperilakuan organisasi ditinjau dari kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?

3. Apakah keperilakuan organisasi ditinjau dari pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh keperilakuan organisasi ditinjau dari dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Untuk menguji pengaruh keperilakuan organisasi ditinjau dari kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Untuk menguji pengaruh keperilakuan organisasi ditinjau dari pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi :

Dapat memberikan kontribusi dalam menambah Literatur mengenai Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

2. Bagi Praktisi :

Sebagai Bahan Pertimbangan dan Masukan bagi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang transparansi dan akuntabilitas.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi: Faktor berperilaku akuntansi, pengertian sistem akuntansi keuangan daerah, kebijakan akuntansi, akuntabilitas dan transparansi, tinjauan penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor berperilaku organisasi terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.